



memastikan bahwa transaksi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum serta sesuai dengan ketentuan POJK No.42/2020 dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) SIG yang terakhir diperbarui pada 1 September 2023.

ensure that these transactions have been carried out per generally accepted business practices and per the provisions of POJK No.42/2020 and the Company's Good Corporate Governance Code (GCG Code) last updated on 1 September 2023.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Changes in Legal Regulations Against Companies in The Last Fiscal Year

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Amendments to Laws and Regulations	Penjelasan Explanation	Pengaruh Terhadap Perusahaan Impact on the Company
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector	Undang-undang ini meliputi ketentuan beberapa sektor keuangan antara lain kelembagaan, perbankan, pasar modal, pasar uang, pasar valuta asing, perasuransian dan penjaminan, asuransi usaha bersama, dana pensiun, kegiatan koperasi, lembaga keuangan mikro, dan lain-lain. This law includes provisions for several financial sectors, among others institutions, banking, capital markets, money markets, foreign exchange markets, insurance and guarantees, joint venture insurance, pension funds, cooperative activities, microfinance institutions, and others.	Perusahaan wajib menyesuaikan peraturan dana pensiun yang dimiliki oleh entitas dana pensiun yang didirikan oleh Perusahaan. The Company is obliged to adjust the regulations for pension funds owned by the pension fund entity established by the Company.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law	Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Peraturan dimaksud saat ini telah ditetapkan menjadi undang-undang. On 30 December 2022, the Government implemented Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation. The regulation in question has now been enacted into law.	Perusahaan wajib tunduk dan menyesuaikan prosedur dan/atau dokumen-dokumen internal Perusahaan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. The Company is obliged to comply with and adapt the Company's internal procedures and/or documents to the provisions stipulated in Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Amendments to Laws and Regulations	Penjelasan Explanation	Pengaruh Terhadap Perusahaan Impact on the Company
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan Government Regulation Number 25 of 2023 concerning Mining Areas	Peraturan yang merupakan pelaksanaan atas ketentuan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan ini mengatur mengenai antara lain (i) mekanisme penetapan wilayah pertambangan, (ii) penugasan kepada lembaga riset negara/ BUMN/ BUMD/ badan usaha lain untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP mineral dan WIUP batubara, (iii) penetapan batas luas WIUP, (iv) pedoman, prosedur, dan penetapan wilayah pertambangan rakyat. Regulations which are implementation of the provisions of several articles of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining as amended by Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. This regulation regulates, among other things, (i) mechanisms for determining mining areas, (ii) assignments to state research institutions/ SOEs/BUMD/other business entities to carry out investigations and research in the context of preparing mineral WIUPs and coal WIUPs, (iii) determining area boundaries WIUP, (iv) guidelines, procedures and determination of community mining areas.	Perusahaan wajib tunduk pada Peraturan ini dalam hal Perusahaan melakukan penetapan wilayah pertambangan, termasuk dalam hal Perusahaan menerima penugasan dari Menteri. The Company is obliged to comply with this Regulation in the event that the Company determines a mining area, including in the event that the Company receives an assignment from the Minister
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi Government Regulation Number 33 of 2023 concerning Energy Conservation	Peraturan ini mengatur mengenai (i) pelaksanaan konservasi energi, (ii) penyediaan data dan informasi mengenai pelaksanaan konservasi energi oleh pemerintah/ pemerintah daerah/ BUMN/ BUMD/ badan usaha lain, (iii) pemberian kemudahan, insentif, dan disinsentif oleh pemerintah/ pemerintah daerah, (iv) pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dalam pelaksanaan konservasi energi. This regulation regulates (i) the implementation of energy conservation, (ii) the provision of data and information regarding the implementation of energy conservation by the government/ regional government/SOEs/BUMD/other business entities, (iii) the provision of facilities, incentives and disincentives by the government/ government regional areas, (iv) guidance and supervision by the Minister in the implementation of energy conservation.	Perusahaan sebagai pengguna sumber energi dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib melaksanakan konservasi energi dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, seperti menerapkan perilaku hemat energi dan/atau menerapkan teknologi efisien energi. Companies as users of energy sources in carrying out their business activities are obliged to implement energy conservation with the provisions as regulated in this Regulation, such as implementing energy saving behavior and/or implementing energy efficient technology.



Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Amendments to Laws and Regulations	Penjelasan Explanation	Pengaruh Terhadap Perusahaan Impact on the Company
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Government Regulation Number 46 of 2023 concerning Amendments to Government Regulation Number 28 of 2021 concerning the Implementation of the Industrial Sector	Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian antara lain mengenai neraca komoditas, importasi bahan baku dan/ atau bahan penolong bagi industri, dan standardisasi industri. This regulation amends several provisions in Government Regulation Number 28 of 2021 concerning the Implementation of the Industrial Sector, including regarding commodity balances, import of raw materials and/or auxiliary materials for industry, and industrial standardization.	Dengan diberlakukannya Peraturan ini, Perusahaan selaku pemilik nomor induk berusaha yang berlaku sebagai angka pengenal importir produsen mendapat kemudahan untuk mengimpor barang jadi namun untuk keperluan komplementer, tes pasar, atau pelayanan purna jual, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. With the enactment of this Regulation, the Company as the owner of the business registration number which acts as an identification number for producer importers has the convenience of importing finished goods, but for complementary purposes, market testing or after-sales service, while still observing the provisions of statutory regulations.
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) di Indonesia Presidential Decree Number 17 of 2023 concerning Determining the End of the <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Pandemic Status in Indonesia	Keputusan ini menetapkan berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 11 dan 12 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021, dan menetapkan status COVID-19 menjadi endemi. This decision determines the end of the COVID-19 pandemic in Indonesia by revoking Presidential Decree Numbers 11 and 12 of 2020 and Presidential Decree Number 24 of 2021, and determining the status of COVID-19 as endemic.	Dengan berakhirnya status pandemi COVID-19 di Indonesia, Perusahaan kembali memberlakukan kebijakan <i>work from office</i> dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan pekerja. With the end of the COVID-19 pandemic status in Indonesia, the Company has re-implemented a work from office policy while still paying attention to workers' health conditions.
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Minister of SOEs Regulation Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises	Peraturan mengenai tahapan penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN serta program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Regulations regarding the stages of special assignments given to SOEs as well as social and environmental responsibility programs.	Perusahaan wajib menyesuaikan prosedur pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. Companies are obliged to adapt procedures for implementing social and environmental responsibility programs to the provisions as regulated in this Regulation.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Amendments to Laws and Regulations	Penjelasan Explanation	Pengaruh Terhadap Perusahaan Impact on the Company
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Minister of SOEs Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises	Peraturan yang merupakan bentuk sinkronisasi dari peraturan-peraturan mengenai prinsip tata kelola BUMN, penerapan manajemen risiko BUMN, penilaian tingkat kesehatan BUMN, perencanaan strategis BUMN, pedoman kegiatan korporasi signifikan BUMN, penyelenggaraan teknologi informasi BUMN, dan pelaporan BUMN. Regulations which are a form of synchronization of regulations regarding SOEs governance principles, implementation of SOEs risk management, level assessment SOEs health, SOEs strategic planning, guidelines for significant SOEs corporate activities, implementation of SOEs information technology, and SOEs reporting.	Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; - Perusahaan harus melakukan penyesuaian terkait a. pedoman kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern; b. pedoman penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; c. pedoman penerapan manajemen risiko; d. pedoma benturan kepentingan; e. pedoman transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; dan f. pedoman kerja sama; g. pedoman perilaku (<i>code of conduct</i>); - Perusahaan harus melakukan pengukuran terhadap penerapan tata kelola dalam bentuk penilaian dan evaluasi; - Perusahaan wajib menyediakan sistem penanganan pengaduan dugaan pelanggaran; - Perusahaan membentuk panitia pengadaan atau pejabat pengadaan atau lembaga profesional untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Implementation of good corporate governance principles; - Companies must make related adjustments a. guidelines for the completeness and implementation of the duties of committees that carry out internal control functions; b. guidelines for implementing compliance, internal audit and external audit functions; c. guidelines for implementing risk management; d. conflict of interest guidelines; e. guidelines for transparency of financial and non-financial conditions; And f. cooperation guidelines; g. code of conduct; - Companies must measure the implementation of governance in the form of assessments and evaluations; - Companies are required to provide a system for handling complaints of alleged violations; - The company forms a procurement committee or procurement officer or professional institution to carry out the procurement of goods and services.



Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Amendments to Laws and Regulations	Penjelasan Explanation	Pengaruh Terhadap Perusahaan Impact on the Company
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Minister of SOEs Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises	Peraturan mengenai syarat anggota Direksi dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN dan anak perusahaan, manajemen talenta Direksi BUMN, tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN, tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan, tata cara pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN dan anak perusahaan, penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN, dan organ pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN Regulations regarding requirements for members of the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs and subsidiaries, talent management Directors of SOEs, procedures for appointing members of the Board of Directors and Board SOEs Commissioners/Supervisory Board, procedures for appointing members of the Board of Directors and Board of Commissioners of subsidiaries, procedures for dismissing members of the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs and subsidiaries, income of members of the Board of Directors and Board of Commissioners/SOEs Supervisory Board, and supporting organs of the Board of Commissioners/SOEs Supervisory Board	Perusahaan wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan calon anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya, termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris di anak perusahaan berikut dengan penetapan penghasilannya. Companies are obliged to adjust the requirements for prospective members of the Board of Directors and Board of Commissioners, including the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners in subsidiaries along with determining their income.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Financial Services Authority Regulation Number 9 of 2023 concerning Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities	Ketentuan ini mengatur antara lain mengenai peran komite audit, pembatasan penggunaan jasa audit, ruang lingkup audit, penyampaian laporan dari Pihak kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengelolaan administrasi AP dan/atau KAP, publikasi daftar AP dan KAP pada Otoritas Jasa Keuangan, pengunduran diri AP dan KAP. Ketentuan ini mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. This provision regulates, among other things, the role of the audit committee, restrictions on the use of audit services, the scope of the audit, submission of reports from parties to the Financial Services Authority, administrative management of AP and/or KAP, publication of the list of AP and KAP at the Financial Services Authority, resignation AP and KAP. This provision revokes Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.	Perusahaan sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan di pasar modal (menerbitkan efek) dan yang menggunakan jasa KAP untuk melakukan audit atas laporan tahunan wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, antara lain melaporkan kepada OJK dalam hal melakukan penunjukan terhadap KAP, memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh KAP sebelum dilakukan penunjukan, serta memperhatikan peran komite audit dalam hal penunjukan KAP. Companies as parties carrying out activities in the capital market (issuing securities) and using KAP services to carry out audits of annual reports are required to comply with the provisions set out in this regulation, including reporting to the OJK in the case of appointing KAP, paying attention to the requirements stipulated in this regulation. must be fulfilled by the KAP before the appointment is made, as well as paying attention to the role of the audit committee in the appointment of the KAP.